

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Desa menjadi salah satu fokus utama dalam pembangunan pemerintah, hal ini disebabkan karena desa merupakan salah satu bentuk pemerintahan yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat. Desa yang merupakan bentuk pemerintahan yang paling dasar dan setingkat dengan kelurahan, diharapkan dapat melaksanakan otonomi daerah dengan sebaik-sebaiknya, salah satunya pemanfaatan potensi desa dan SDM yang tersedia.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa "Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia". Undang-Undang ini menegaskan bahwa setiap daerah otonom, seperti kabupaten/kota, memiliki hak dan kewenangan untuk mengelola, mengatur, dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan aspirasi masyarakat. Prinsip otonomi daerah pada tingkat pemerintahan kabupaten dan kota juga mencakup perluasan pembangunan hingga ke tingkat terendah dalam sistem pemerintahan di Indonesia, yaitu desa.

Suatu desa perlu mengembangkan sumber pendapatan mandiri karena desa sering memiliki Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang terbatas. Keterbatasan APBDes ini dapat mengakibatkan tingkat kemiskinan

dan pengangguran yang tinggi di desa, serta kesulitan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa (PADes) mereka. Selain itu, dana operasional desa juga seringkali terbatas, yang bisa membatasi kemampuan desa dalam memberikan pelayanan publik yang memadai. Meskipun desa melakukan banyak pembangunan, seringkali mereka bergantung pada sumber daya luar dan tidak dapat mengelolanya secara mandiri.

Penting bagi desa untuk mencari sumber pendapatan lokal yang dapat meningkatkan PADes dan memberdayakan masyarakatnya, karena mereka menghadapi banyak keterbatasan finansial. Pemerintah Indonesia membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Anggota masyarakat dan perwakilan dewan desa bekerja sama menjalankan BUMDes, sebuah perusahaan lokal. Membangun BUMDes sebagian besar bertujuan untuk memperkuat perekonomian desa melalui pemanfaatan sumber daya dan peluang lokal. Meningkatkan Pendapatan Asli Desa merupakan tujuan utama BUMDes (Supeno, 2023).

BUMDes adalah organisasi yang dikelola masyarakat yang mengumpulkan sumber daya ekonomi desa dan mendorong pengembangannya menjadi perusahaan lokal. Guna mewujudkan pemerataan ekonomi di dusun, BUMDes ditujukan untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan membantu rumah tangga miskin menjadi kaya (Miss Ivon et al., 2023).

Untuk menggambarkan kekhususan keuangan atau uang kerja, penyelenggaraan BUMDes memerlukan pelaporan keuangan dan pengelolaan

keuangan. Direktur BUMDes mempunyai tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan bulanan seluruh unit usaha BUMDes sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 yang berkaitan dengan Pendirian, Pengelolaan, Pengelolaan, dan Perubahan Badan Usaha Milik Desa. Saat menyusun laporan keuangannya, BUMDes harus mematuhi seluruh peraturan keuangan terkait secara ketat.

Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan BUMDes dapat didasarkan pada Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP). Usaha kecil dan menengah di Indonesia menjadi target audiens SAK ETAP. Menurut Supeno (2023), tujuan SAK ETAP adalah untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan bagi usaha kecil dan menengah.

Standar SAK ETAP merupakan pilihan yang tepat untuk pembuatan laporan keuangan BUMDes karena relatif sederhana dan mudah dalam memfasilitasi proses pelaporan. Neraca, Perubahan Ekuitas, Arus Kas, Laba Rugi, dan Catatan atas laporan Keuangan merupakan beberapa laporan keuangan yang wajib disediakan oleh BUMDes untuk SAK ETAP (Nurhayati et al., 2022).

Penelitian sebelumnya menemukan bahwa banyak BUMDes yang tidak mengikuti pedoman SAK ETAP dalam menyusun laporan keuangannya. Laporan keuangan yang akurat dan berkualitas tinggi adalah tanggung jawab akuntan dengan pelatihan dan pendidikan yang tepat, karena laporan ini merupakan bagian integral dari profesi akuntansi. Akibatnya banyak BUMDes yang bingung bagaimana cara membuat laporan keuangan.

Di Panggungharjo, Kecamatan Sewon, Kabupaten Bantul, Provinsi Yogyakarta, Anda bisa menemukan BUMDES Panggungharjo, sebuah Badan Usaha Milik Daerah. Pemerintah Desa Panggungharjo mendirikan Perusahaan Desa (Perusdes) Panggungharjo pada bulan Maret 2013 dengan Peraturan Desa nomor. 7 Tahun 2013 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa. Menyikapi berkembangnya KUPAS, dibentuklah kelompok pengelolaan sampah di salah satu dusun Panggungharjo, BUMDES Panggungharjo. KUPAS kemudian menjadi Unit Usaha pada saat BUMDES Panggungharjo berdiri. Pemerintah Desa Panggungharjo mengalokasikan Rp37.000.000,- yang digunakan sebagai modal awal BUMDES Panggungharjo.

Saat Bumdes Panggungharjo pertama kali dibuka, hanya divisi KUPAS yang mereka miliki (Kelompok Usaha Pengelolaan Sampah). Karena PEEI merupakan wujud kekhawatiran terhadap semakin buruknya kebersihan lingkungan akibat semakin banyaknya sampah komunal, maka perlu adanya perhatian yang cermat. Setidaknya dua puluh orang telah mendapatkan prospek kerja langsung berkat Unit KUPAS BUMDes Panggungharjo. Sebelum digunakan sebagai lokasi BUMDes, fasilitas pengelolaan sampah tersebut merupakan tempat pembuangan barang haram. Karena kurangnya pemberitahuan, penduduk desa kembali membuang sampah sembarangan dua bulan setelah pemerintah desa memerintahkan evakuasi mereka pada tahun 2012, dan kali ini, sebuah tanda bertuliskan "membuang sampah akan dikenakan denda" menjadi peringatan lebih lanjut. Daripada tidak membuang sampah di sana, warga desa justru ingin diberi sanksi. Uang denda tersebut

digunakan untuk membuang sampah di kawasan tersebut. Karena pendirian Badan Usaha Milik Desa didorong oleh pergerakan uang ini, BUMDes memulai dengan mengatasi permasalahan yang terjadi.

Unit usaha kedua BUMDes Panggung Lestari, Kampong Mataram, memulai debutnya pada tahun 2017. Hal ini didasarkan pada ide wisata desa, yang bertujuan untuk menciptakan kembali nuansa pedesaan abad ke-19 melalui penggunaan pakaian, perumahan, dan bangunan asli abad ke-19. dan masakan. Ratan dan Pasardesa.id merupakan dua divisi yang diluncurkan BUMDes Panggung Lestari pada tahun 2020. Selain untuk mencegah penyebaran pandemi COVID-19, Pasardesa.id diciptakan untuk menjadi platform penjualan barang-barang lokal Panggunharjo. Sedangkan Ratan merupakan salah satu bagian dari BUMDES Panggung lestari Panggunharjo yang dibentuk melalui kemitraan dengan masyarakat Desa Panggunharjo. Ratan bergerak dalam bisnis penyewaan gedung serbaguna untuk acara seperti pernikahan, konser, dan pertemuan.

BUMDes Panggung Lestari tidak menggunakan standarisasi atas penyusunan laporan keuangan. BUMDes Panggung Lestari memiliki pendapatan yang sangat besar pertahunnya yaitu lebih dari 1 Milyar rupiah. Oleh karena itu dibutuhkan standarisasi dalam proses penyusunan laporan keuangan. Melihat hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil penelitian dengan judul **“PENERAPAN SAK ETAP PADA LAPORAN KEUANGAN BUMDES PANGGUNG LESTARI DESA PANGGUNG HARJO”**.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka pertanyaan pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perbandingan aspek laporan keuangan BUMDes Panggung Lestari dengan SAK ETAP pada penyajian laporan keuangan BUMDes Panggung lestari Desa Panggung Harjo?
2. Bagaimana Usulan Penyajian Laporan Keuangan BUMDes Panggung Lestari sesuai dengan SAK ETAP?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pertanyaan penelitian yang telah disajikan, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk membandingkan aspek akuntansi yang diterapkan saat ini dengan SAK ETAP
2. Untuk memberikan usulan dalam menyajikan Laporan Keuangan BUMDes sesuai dengan SAK ETAP.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari segi teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan terhadap penerapan SAK ETAP Laporan Keuangan BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo.

- b. Penelitian ini diharapkan akan menjadi referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang tertarik dalam mengkaji penerapan SAK ETAP pada laporan keuangan BUMDes.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah Desa (Khususnya bagi BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo)

Untuk menerapkan SAK ETAP pada pencatatan keuangan BUMDes Panggung Lestari Desa Panggung Harjo, informasi tersebut dapat dijadikan landasan. Tujuan kami adalah agar pemerintah desa lainnya dapat menggunakan studi kami sebagai panduan ketika mereka menerapkan SAK ETAP pada laporan keuangan mereka.

- b. Bagi Kampus UNJ

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakupan pengetahuan, menjadi referensi, dan memberikan dorongan bagi penelitian yang akan datang. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pemahaman terkait dengan penelitian yang berkaitan.